

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi dengan Judul :

Peningkatan Pertumbuhan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Pasca Perang Dingin

Di China

Evita Mega Kumalasari

20140510398



Yang Disetujui

Dr. Siti Azizah M.Si
Dr. Siti Azizah M.Si

Dosen pembimbing

PENINGKATAN PERTUMBUHAN NON GOVERNMENTAL ORGANISATION (NGO) PASCA PERANG DINGIN

Di China

Evita Mega Kumalasari

Penelitian Payung : Dr. Nur Azizah

Jurusan Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

China adalah negara yang menganut sistem ideology komunisme. Awal peradaban China dimulai dalam bentuk dinasti yaitu Dinasti Xia, Shang, Zhou dan diakhir dengan Dinasti Qing. China yang merdeka pada 1 Oktober 1949 sangat kental dengan praktek-praktek komunis. Terlebih lagi pada masa kepemimpinan Mao Zedong yang dikenal sangat tertutup dengan dunia luar dan melarang adanya gerakan-gerakan perubahan atau revolusioner. Mao khawatir jika mengijinkan adanya gerakan perubahan maka nilai-nilai dan ideology barat mempengaruhi sistem komunisme yang sedang berjalan saat itu. Salah satu gerakan perubahan yaitu organisasi non pemerintah atau yang lebih sering disebut NGO. Pemerintahan Mao Zedong melarang adanya organisasi yang bergerak dibidang demokrasi. NGO di China tergolong sangat lambat dibandingkan dengan negara lain. Tetapi pada Pasca Perang Dingin tahun 1990an pertumbuhan NGO semakin meningkat jumlahnya di China. Terdapat dua kemungkinan mengapa NGO di China meningkat pasca Perang Dingin. Pertama, peningkatan NGO di China terjadi karena adanya kebijakan pintu terbuka yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Kedua, peningkatan ekonomi memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan berjejaring dengan dunia luar. Dalam penelitian ini akan

digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel dan media online seperti website resmi maupun berita online.

Kata Kunci : NGO, peningkatan ekonomi, berjejaring

Pendahuluan

China atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Republik Rakyat China atau RRC merdeka pada 1 Oktober 1949. China menganut ideologi komunisme tetapi selain komunisme, ada beberapa ideologi yang terdapat di China yaitu sosialisme, konfusianisme dan nasionalisme. China beribukota di Beijing yang terletak di daratan China. Jika membahas tentang sejarahnya, peradaban China dimulai pada 221 sebelum masehi dengan negara yang berbentuk dinasti. Dinasti yang pertama adalah Dinasti Xia dilanjutkan dengan Dinasti Shang, Dinasti Zhou, dan sederetan dinasti lain hingga dinasti terakhir dan dinasti yang berkuasa paling lama yaitu Dinasti Qing. Tahun 1911, kekuasaan Dinasti Qing digulingkan oleh Revolusi Xinhai. Revolusi Xianhai yang sukses kemudian mendapat sambutan dari banyak kalangan di Cina, seperti para pegawai muda, tentara, dan pelajar. Sun Yat Sen pun diangkat sebagai presiden pertama Republik Cina pada 12 Maret 1912. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong

memproklamkan berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC) di Tiananmen.

Sistem komunisme yang dianut China diperkuat dengan adanya partai komunis terbesar di China yaitu Partai Komunis China atau PKC. Pemerintah China sendiri hanya menerapkan sistem satu partai dominasi dan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus selaras dengan PKC. Komunis sudah mulai menguasai China sejak 1949 yang beriringan dengan perkembangan PKC. PKC juga memegang kendali penuh atas pemerintah. Dengan jumlah anggota sebanyak 89 juta orang menjadikan PKC sebagai partai terbesar didunia (Darlington, 2017).

Dengan sistem komunisme yang dianut, membuat China menjadi tertutup dan tidak mau menerima kelompok-kelompok yang bergerak dibidang demokrasi seperti Non Governmental Organization atau NGO. Keberadaan *NGO* sudah ada sejak 2,5 dekade yang lalu tetapi mulai berkembang cukup pesat saat era reformasi. Meskipun begitu namun banyak masalah yang harus dihadapi oleh *NGO* untuk

mewujudkan kondisi peran aktor sosial yang kondusif. Beberapa masalah yang harus dihadapi diantaranya yaitu kebijakan pemerintah terhadap *NGO*, terbatasnya kapasitas pemerintah dalam mengendalikan permasalahan korupsi yang ada di *NGO*, ketergantungan *NGO* dalam mendapatkan motivasi dari pemerintah dan beberapa kebudayaan politik China yang membuat tidak kondusifnya aktivitas para aktivis (Lu, 2005).

Tahun 1980an, isu dan tantangan mulai bermunculan yang memaksa masyarakat China untuk mengejar kepentingan-kepentingan mereka. Kepentingan yang menuntut adanya reformasi ekonomi dan kehidupan sosial untuk mendorong adanya modernisasi. Konsep *NGO* mulai disebarluaskan kepada publik saat diselenggarakannya konferensi perempuan pada tahun 1995 di Beijing (Brief, Spesial report : The Role and Challenges of International in China's Development, p. 9). Mulai saat itulah dapat dikatakan para aktivis

banyak bermunculan dan membentuk sebuah kelompok untuk dikembangkan.

Peningkatan mulai terjadi Pasca Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1991. Pada tahun tersebut NGO maupun kelompok demokrasi lainnya berkembang pesat di China. Pasca Perang Dingin beriringan dengan runtuhnya rezime totaliter yang ada di Eropa Timur yang membawa perubahan sistem totaliter menjadi sistem demokrasi dan diperkirakan hal tersebut juga berdampak pada China. Selain itu pasca Perang Dingin dominasi komunisme yang ada di China mulai berkurang dan mulai banyak tuntutan dari masyarakat China yang menginginkan adanya gerakan dan sistem demokrasi.

FENOMENA KEMUNCULAN *Non Governmental*

Organization (NGO)

Di China

A. Awal Kemunculan NGO di China

China yang awalnya merupakan Negara berbentuk dinasti yaitu Dinasti Xia, Dinasti Shang, Dinasti Zhou, dan diakhiri dengan Dinasti Qing yang paling lama berkuasa di Negara tersebut. Sebelum kekuasaan Dinasti Qing berakhir terdapat tanda-tanda keruntuhan dinasti tersebut diantaranya yaitu korupsi yang merajalela, pemborosan keuangan dinasti, meninggalnya raja-raja yang pernah membawa kejayaan dinasti Qing dan pemerintah Dinasti Qing dianggap kolot dan rusak. Factor-faktor itulah yang memicu adanya gerakan nasionalis untuk mengubah bentuk Negara dari dinasti menjadi republik.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya konsep NGO sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu. Pada masa dinasti kekuasaan penuh berada ditangan kekaisaran. Ketika organisasi di Barat berada dalam lingkup gereja, di China organisasi pada saat itu berada ditangan kekaisaran dan kekerabatan kerajaan. Organisasi tersebut dapat dikatakan juga memberikan keuntungan bagi mereka yang hidup diluar kekaisaran. Organisasi kekaisaran ini mulai menyebar luas pada

masa dinasti Qing. Awalnya organisasi kekerabatan kekaisaran tersebut bergerak dalam kegiatan amal dan menentang adanya modernisasi namun pada periode modern organisasi tersebut dinilai telah melanggar dan meremehkan aturan kekerabatan kekaisaran.

Beberapa pendapat mempercayai bahwa perkembangan NGO di China yang dinilai cukup lambat disebabkan tidak adanya masyarakat sipil atau civil society sebelumnya di China. Hal tersebut benar adanya jika dibandingkan negara negara lain yang sudah memberikan kepercayaan kepada civil society untuk memberikan pelayanan dan program terkait kesejahteraan sosial. Suatu hal yang menarik dari pertumbuhan NGO di China ketika NGO-NGO tersebut mulai tumbuh dan berkembang di era revolusi (YE, 2003).

Selama perang anti-Jepang dan perang saudara di China pada 1930an dan 1940an Partai Komunis China atau PKC mendorong adanya pertumbuhan organisasi dan NGO di negara tersebut. Disaat itu pula Mao Zedong memerintahkan PKC untuk membentuk persatuan terdepan bersama organisasi lain untuk melawan Jepang dan

Koumintang. Pada tahun 1941-1943 PKC berusaha untuk mengusir Jepang dan memblokir Koumintang yang kemudian mengambil alih kendali dibawa control komunis. Setelah perang berakhir PKC mengambil kembali apa yang telah direbut oleh Jepang dan menambah kekuatannya serta berterima kasih pada Mao Zedong atas kebijakannya dalam melakukan perlawanan (*Ibid*).

Dibawah kepemimpinan dan pengarahan Mao, menerapkan ketentuan sementara yang berkaitan dengan hak warga negara dan hukuman kepada yang menentang revolusioner. Semua kegiatan yang bertentangan dengan revolusioner seperti yang berbau feodal dan kapitalis akan mendapatkan hukuman salah satu hukumannya yaitu dicabut hak politiknya. Untuk menggiring seluruh organisasi massa agar dibawah naungan partai komunis, Kementrian Urusan Dalam Negeri memberikan peraturan agar setiap organisasi massa mampu bertanggung jawab atas registrasi dan program yang dijalankan oleh setiap NGO. Ketentuan sementara mengenai registrasi organisasi massa yang diterapkan pada 1950, harus meliputi beberapa kategori :

1. Organisasi massa yang bergerak diaktivitas sosial seperti perhimpunan buruh, perhimpunan petani, federasi perdagangan dan industry, federasi perempuan, dan perhimpunan pemuda.
2. Organisasi untuk pelayanan public seperti Asosiasi Kesejahteraan China dan Palang Merah.
3. Kesenian dan kelompok kepustakaan seperti Asosiasi kesenian dan kepustakaan serta Asosiasi Drama dan Teater.
4. Organisasi penelitian akademik seperti organisasi tenaga kesehatan professional dan organisasi pekerja ilmu sosial.
5. Organisasi keagamaan seperti kelompok Kristen dan Buddha
6. Seluruh organisasi yang diakui oleh hukum.

Pertumbuhan NGO di China sempat dihentikan selama hampir 20 tahun. Hingga pada tahun 1980an mulai muncul gerakan-gerakan demokrasi yang mendesak pemerintah untuk mengizinkan adanya gerakan demokrasi. Pemicu lain dari kemunculan gerakan demokrasi adalah tragedi Demonstrasi Tiananmen yang terjadi pada 4 Mei 1989

diikuti oleh 100 ribu orang. Tragedi tersebut dapat dikatakan sebagai tragedi berdarah karena banyaknya korban yang berjatuh. Demonstrasi Tiananmen diawali adanya protes mahasiswa dan aktivis karena adanya ketidakstabilan ekonomi dan korupsi yang merajalela. Selain itu para demonstran menuntut adanya reformasi kebebasan media dan gerakan demokrasi yang tidak pernah diijinkan ada dinegara tersebut (Tiananmen 1989, Peristiwa Paling Berdarah di Tiongkok).

Kemungkinan yang paling besar dari perkembangan masyarakat sipil global di China disebabkan adanya Konferensi Perempuan yang diadakan oleh PBB pada tahun 1995 di Beijing. Konferensi tersebut dapat dikatakan sebagai puncak dari pertumbuhan masyarakat sipil di China. Bagian dari konferensi perempuan tersebut membawa peran penting dalam memperkenalkan konsep NGO kepada China. Mereka yang menganggap dirinya sebagai NGO sudah mulai memasuki ruang publik dan organisasi yang didirikan oleh perempuan yang sebelumnya mereka sebut sebagai GONGOs seperti All China Women Federation (ACWF) saat ini mereka menyebutnya dengan NGO (*Ibid*). ACWF

merupakan sebuah pertanda bahwa China telah menjadi negara yang lebih terbuka dengan gerakan-gerakan demokrasi.

B. Macam-macam NGO di China

Jumlah NGO yang berada di China diperkirakan 1000-6000 NGO. Namun jumlah tersebut belum dapat dipastikan karena masih banyak organisasi yang belum mencatatkan diri mereka ke Kementerian Urusan Dalam Negeri. Deng Guongsheng, ilmuwan dari Tsinghua yang meneliti jumlah NGO di China, menyebutkan bahwa jumlah NGO yang sudah terdaftar maupun yang belum sebanyak 1000-2000 organisasi. Deng juga mengutip dari berbagai sumber untuk jumlah organisasi internasional yang sudah beroperasi di China pada tahun 2000 terdapat lebih dari 1000 organisasi yang terdiri dari 700 yayasan, 70 agensi advokasi, 200 organisasi yang bergerak dibidang amal dan 150 organisasi agama.

NGO di China dibagi menjadi dua kategori yaitu GONGOs dan Popular NGO. GONGOs adalah organisasi non pemerintah yang

didalamnya terdapat campur tangan dari pemerintah pusat. Berikut ini adalah table nama dan aktivitas dari NGO jenis ini :

| NO. | Nama NGO | Aktivitas NGO |
|------------|---|---|
| 1. | International Union for Conservation of Nature | Restorasi, pengolahan ke hayati, hutan, lahan basah dan |
| 2. | Red Cross Society in China | Membantu prajurit yang terlu dan pengungsi yang terkena d |
| 3. | National Endowment Democracy | Menyuarakan demokrasi dan China |
| 4. | Quasi Autonomous Non Governmental Organization (QUANGO) | Memberikan pelayanan memberikan saran terkait per |

Sedangkan untuk Popular NGO adalah organisasi non pemerintah yang cenderung mandiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah setempat. Berikut ini adalah nama dan aktivitas dari Popular NGO :

| NO. | Kategori NGO | Nama NGO | Aktivitas |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. | Humanitarian NGO | a. Children in Crisis | Memberdayakan o kesejahteraan |

| | | | |
|----|----------------|---------------------------------------|---|
| | | | difabel, dan perem |
| | | b. Holt China Children's Service | Membantu kel memiliki anak khusus |
| | | c. Chi Heng Foundation | Berbasis amal unt keharmonisan dan |
| | | d. Marie Stop International | Mengendalikan p dini |
| | | e. American Himalaya Foundation | Memberikan bant tempat tinggal, pe penduduk Himala |
| 2. | NGO Lingkungan | f. Environmental Defense Fund | Menyelesaikan lingkungan laut, c iklim |
| | | g. Environmental Investigation Agency | Menjaga lingk mengkampanyeka yang hidup di alar |
| | | h. Fauna and Flora International | Melindungi s ekosistem |
| 3. | NGO Kesehatan | a. Family Health International | Memberikan du yang berkait HIV/AIDS dan kehidupan manusi |

| | | | |
|----|-------------------|--------------------------------|--|
| | | b. Hong Kong AIDS Foundation | Meminimalisir dengan member tentang bahaya HI |
| 4. | NGO Pro Demokrasi | a. Hong Kong Alliance | Mendukung ada demokrasi dan untuk kediktatoran |
| | | b. Human Right in China (HRIC) | Mempromosikan yang fundam meningkatkan kes hak asasi manusia |

C. Hambatan yang dihadapi

Meningkatnya pertumbuhan NGO di China memberikan dampak yang baik untuk kehidupan masyarakatnya. Dukungan pemerintah setempat membuat NGO lokal maupun internasional memiliki ruang gerak yang luas dalam aktivitasnya seperti menyediakan pelayanan sosial, meningkatkan kesadaran teknologi, masyarakatnya menjadi lebih kuat dan juga memberikan edukasi terkait mitigasi bencana. Namun aktivitas para NGO tersebut bukan

berarti tidak mengalami hambatan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hambatan tersebut muncul dari pemerintah China yang merasa khawatir dengan keberadaan organisasi dan kelompok sosial tersebut. Pemerintah khawatir dengan potensi pendanaan dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh setiap organisasi tersebut adalah nilai demokrasi dan nilai-nilai barat yang jelas bertentangan dengan ideologi yang dianut (Brief, Special Report: The Roles and Challenges of International NGOs in China's Development, pp. 11-12). Kekhawatiran pemerintah membuat NGO tidak leluasa dalam memperluas jangkauan kegiatannya.

Hambatan lainnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak NGO untuk karakteristik mereka terkait partisipasi politik. Pemerintah China mengadopsi kebijakan dalam mencegah terbentuknya NGO yang dapat menjadi tantangan politik dengan cara melemahkan kendali masyarakat atau membatasi otonomi dalam merumuskan kebijakan sosial dan ekonomi. Contohnya ketika Kementerian Urusan Sipil Dalam Negeri mempertimbangkan aplikasi

penetapan karakteristik NGO yang mana pemerintah melarang adanya NGO yang bergerak dibidang politik dan keagamaan.

Kebijakan pemerintah terkait pembatasan NGO tidak hanya berhenti pada karakteristik saja tetapi NGO juga dilarang untuk tumbuh dan mengembangkan jaringan organisasi yang luas. Dengan kata lain NGO-NGO tersebut dilarang untuk berjejaring dengan organisasi dan komunitas di negara lain. Tujuan mereka adalah untuk mendirikan cabang organisasi agar dapat menyebarkan ide-ide yang mereka miliki dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang lebih luas tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan kebijakan pemerintah terkait pelarangan NGO untuk memperluas jari

FAKTOR PENDORONG PENINGKATAN NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) di CHINA

A. China dan Globalisasi

Fenomena globalisasi membawa dampak yang sangat besar bagi segala kehidupan tidak terkecuali dalam kehidupan ekonomi.

Sebagian besar negara merasakan dampak positif dari globalisasi ekonomi, termasuk China. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebuah lembaga yaitu Mckiney Global Institute menemukan bahwa globalisasi membawa pergerakan yang bagus dari segi keuangan, manusia dan GDP. China adalah salah satu negara didunia yang merasakan keuntungan dan dampak positif dari globalisasi tersebut.

Arus globalisasi yang terjadi ternyata tidak semua negara menerima fenomena tersebut tidak terkecuali China. Dorongan ekonomi China, membuat negara tersebut harus mampu menyesuaikan arus globalisasi dengan karakteristik negara tersebut. China yang dinilai tertutup, sempat menolak adanya nilai-nilai globalisasi yang dianggapnya terdapat nilai-nilai barat didalamnya dan tidak menyambut baik adanya reformasi ekonomi, sosial dan politik. Negara lain berpendapat bahwa modernisasi dari globalisasi adalah ketika sebuah negara dapat menerima segala bentuk reformasi ekonomi, sosial dan politik. Namun pendapat tersebut tidak sama dengan China yang menolak adanya pembangunan dan perubahan. Bahkan China

membatasi akses informasi dan kebebasan warganya serta membatasi organisasi asing yang akan beroperasi dinegara tersebut (Zukus, 2017).

Kemunculan dan percepatan pergerakan globalisasi membuat pemerintah lebih memperhatikan bagaimana cara agar dapat mempertahankan dampak positif dari globalisasi namun juga harus mampu dalam penanganan dampak negatif dari globalisasi. Banyaknya tuntutan globalisasi, China lebih memperhatikan prospek ekonominya yang harus memenuhi integrasi pasar dunia. Saat ini China mulai untuk mengartikulasikan keinginan pemerintah agar mampu bersaing di era globalisasi. Dengan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh China, dunia globalisasi bergantung pada apa yang dimiliki oleh China. Terlebih lagi saat GDP China mengalami kenaikan hingga dua digit angka pada era 2000an (Woetzel, Seong, Madgavkar, Lund, & Lin).

Globalisasi dan lingkungan internasional menjadikan China lebih nyaman untuk terjun langsung didunia internasional. Terlebih lagi pada tahun 1990an adalah masa berakhirnya perang dingin yang mana banyak negara yang mendukung adanya kebijakan pintu terbuka

oleh China dan perekonomian dunia cenderung stabil. Sehingga China menjadi lebih leluasa untuk melebarkan sayapnya di internasional. Semakin lebar China membuka peluang globalisasi maka akan semakin besar dan kuat pula jaringan internasional China. Keuntungan-keuntungan tersebut tidak hanya berdampak baik pada politik luar negeri internal saja tetapi juga pada sector investasi yang ada di China (He & Chaohui, 2017)

B. Pertumbuhan ekonomi China

Peningkatan yang sangat terlihat dari adanya globalisasi di China tidak lain adalah pasar global ekonomi yang terus mengalami perbaikan yang signifikan. Selama periode globalisasi tersebut terjadi pergeseran dalam kehidupan ekonomi masyarakat China. Dulunya masyarakat lebih memilih untuk bekerja dibidang agraria dan pertanian, setelah adanya pasar ekonomi global, mereka memilih untuk bekerja dibidang industry. Hal tersebut adalah salah satu pendorong adanya peningkatan GDP dan upah pekerja masyarakat China.

Berbagai perubahan yang dialami oleh China diawali dengan adanya reformasi ekonomi yang terjadi pada tahun 1978.

Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi, pembangunan ekonomi mengalami peningkatan dan pada masa itu pemerintah mampu mengentaskan kemiskinan kurang lebih 800 juta penduduk. Sebelum pemerintah China memperkenalkan reformasi ekonomi, rata-rata pertumbuhan GDP China berkisar 5,3 % pada tahun 1960-1978. Terlebih lagi di era 2000an yang menunjukkan angka lebih dari 8 %. Kecepatan pertumbuhan ekonomi China tidak hanya dilihat dari peningkatan GDP tetapi juga kecepatan perpindahan penduduk, tantangan lingkungan yang tidak pasti setiap waktunya dan adanya penekanan jumlah penduduk China (Bank, 2017).

Adanya kebijakan pintu terbuka dan reformasi ekonomi menjadikan China sebagai negara yang memiliki perekonomian baik setelah Amerika. Bahkan beberapa sumber online menyebutkan bahwa China adalah salah satu rekan kerjasama ekonomi yang penting bagi

Amerika dalam hal perdagangan maupun sumber dari barang ekspor import.

C. Kemudahan berjejaring masyarakat China

Adanya reformasi ekonomi dan modernisasi menjadikan China sebagai negara yang lebih terbuka dan memberikan peluang baru bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi. Semakin banyaknya masyarakat yang berpartisipasi maka akan semakin besar pula terbentuknya masyarakat sipil modern atau *civil society* (YE, 2003, p. 1). Munculnya *civil society* atau masyarakat sipil modern menjadikan kekuasaan yang tadinya hanya dijalankan oleh pemerintah pusat juga dapat dijalankan oleh rakyat. Tidak hanya menjalankan kekuasaan, namun kemunculan *civil society* dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik.

Civil society membawa perubahan yang positif untuk masyarakat China. Mereka menjadi lebih terbuka dengan hal-hal baru dan memiliki edukasi yang lebih serta ekonomi yang jauh lebih kuat sehingga tidak sedikit dari mereka yang ikut berpartisipasi dalam

proses pengambilan kebijakan. Organisasi non pemerintah seolah membawa angin segar bagi masyarakat khususnya di China. Mereka memiliki wadah untuk menyalurkan opini dan aspirasi. Terlebih lagi setelah adanya era reformasi yang sarat akan tuntutan dan mengharuskan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam jurnal ini penulis akan menganalisa perekonomian masyarakat China yang meningkat dapat mempengaruhi peningkatan *civil society* dan pertumbuhan NGO karena masyarakat khususnya masyarakat China lebih mudah untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan berjejaring. Peningkatan pertumbuhan NGO terlihat jelas pada masa pasca perang dingin hingga tahun 2000an. Pada masa tersebut diperkirakan terjadi perubahan rezim totaliter menjadi rezim demokrasi dan China menjadi salah satu negara yang terkena dampak perubahan rezim tersebut.

China yang dianggap sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia yang menunjukkan peningkatan dalam presentase ekonominya. Sumber lain menyebutkan bahwa sebagai negara yang

memiliki ekonomi yang baik nomer dua didunia, China mengalami kenaikan yang pesat dalam pemberian upah pekerja yang berpengaruh pula pada pendapatan setiap keluarga di China. Dengan meningkatnya upah pekerja China maka semakin meningkat pula pendapatan perkapita masyarakatnya. Pendapatan perkapita penduduk China dinilai sangat cepat jika dibandingkan dengan negara lainnya. Dari kenaikan pendapatan perkapita penduduk China sangat berpengaruh pada berkurangnya masyarakat miskin dinegara tersebut terutama setelah adanya reformasi ekonomi.

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat China dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada dinegara tersebut. Berkurangnya kemiskinan membuat masyarakat China memiliki daya beli yang tinggi dan diiringi dengan meningkatnya *bargaining position*. *Bargaining position* merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk menunjukkan bahwa adanya peningkatan daya tawar masyarakat. Ketika masyarakat memiliki daya

tawar yang tinggi maka tidak menutup kemungkinan mereka akan memiliki keamanan baik dari segi ekonomi maupun intelektual.

Individu maupun kelompok yang memiliki keamanan intelektual mereka akan cenderung membentuk komunitas atau organisasi yang dinilai mampu menampung aspirasi masyarakat serta membantu penyelesaian masalah di era globalisasi saat ini. Permasalahan era globalisasi tidak hanya yang berkaitan dengan perekonomian tetapi juga yang berkaitan dengan isu-isu internasional seperti lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, dll. Organisasi-organisasi tersebut bersifat non profit, ada yang resmi dibawah naungan pemerintah ada pula yang berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah setempat. Organisasi tersebut sering disebut sebagai *Non Governmental Organization* atau *NGO*.

Peningkatan NGO di China sudah terjadi sejak tahun 1990an dan mulai berkembang pasca perang dingin. Dengan terbukanya China dengan gerakan demokrasi membuat Negara tersebut juga lebih terbuka dengan dunia internasional dan mulai bergabung dengan

komunitas internasional. Salah satu contoh komunitas internasional yang diikuti oleh China adalah WTO. Pada tahun 2001 China mulai bergabung dengan WTO yang membuat negara tersebut dikenal sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi setelah Amerika. Bahkan tidak jarang kedua negara tersebut diakui sebagai rekan kerjasama dengan kualitas ekonomi yang sama. Bergabung dengan WTO, China mulai berani untuk membuka pasar untuk perdagangan internasional dan investasi (Chow).

Sektor ekonomi yang berpengaruh saat China bergabung dengan WTO adalah agrikultur, industry dan pelayanan terutama dalam bidang telekomunikasi serta beberapa keuntungan lainnya. Pertama, rendahnya tarif import. Kedua, adanya ijin untuk menjual barang secara langsung di pasar domestik China. Ketiga, terbuka dengan telekomunikasi dan keuangan yang dapat membuka peluang adanya kompetisi internasional. Pertumbuhan NGO China mencerminkan bahwa mereka tumbuh dilingkungan masyarakat sipil politik yang mengidentifikasikan diri mereka dari masalah yang

dihadapi. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari kehidupan mereka sehari-hari seperti permasalahan lingkungan, hak atas kehidupan layak bagi mereka yang mendapatkan masalah etnis atau minoritas. Permasalahan NGO bukan lagi tentang penularan penyakit atau adanya diskriminasi yang seolah-olah mengatasnamakan kelompok atau perwakilan tetapi NGO saat ini mengatasnamakan diri mereka sendiri untuk memberanikan diri berbicara atas apa yang mereka keluhkan (Gadsden, 2010).

PERAN NGO di CHINA

A. Implementer Role

Sebagai Implementer Role NGO berperan sebagai organisasi yang memobilisasi dalam menyediakan sumber daya dan pelayanan yang baik bagi target mereka. Mobilisasi tersebut mereka lakukan berdasarkan kegiatan mereka, pemerintah maupun agen pendonor yang memberikan bantuan kepada NGO tersebut. Banyak kegiatan NGO yang dinilai bagus dalam menjalankan program mereka dan

menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat seperti peduli kesehatan, keuangan, penyuluhan pertanian, nasehat hukum bagi masyarakat hingga pemberian bantuan secara darurat. Tidak jarang NGO melakukan perjanjian dengan pemerintah maupun pendonor dana dalam penanganan masalah yang nantinya dapat terjadi hubungan timbal balik (Lewis, hal. 68).

Salah satu implementer role yang dilakukan oleh NGO di China adalah pemberian bantuan darurat bencana alam. Seperti yang terjadi pada 12 Mei 2008 saat China khususnya di daerah Sichuan diguncang gempa. Pada 23 April 2013 para petinggi NGO dan pemimpin grassroot NGO berkumpul untuk menanggapi tanggap darurat bencana yang menewaskan lebih dari 80.000 orang. Diskusi tersebut berkaitan dengan pemberian bantuan dan pemulihan setelah bencana. Pemerintah China memerintahkan NGO untuk mendistribusikan bantuan pada korban bencana Sichuan. Setidaknya ada 18 NGO yang ikut mendistribusikan bantuan di wilayah tersebut

dan membantu pemerintah untuk pemulihan wilayah bencana (Asia, 2013).

Salah satu contoh NGO yang beroperasi di China yang sesuai dengan implementer role yaitu ICRC China atau International Commite of Red Cross. Organisasi yang berdiri sejak 1863 memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada korban yang terkena dampak perang dan konflik serta mempromosikan hukum yang digunakan untuk melindungi korban perang. Kegiatan ICRC tidak hanya memberikan bantuan terhadap korban perang saja tetapi juga yang berkaitan dengan kesehatan, pemerhati lingkungan bahkan pada keamanan. Sasaran NGO ini pun beragam mulai dari perempuan, anak-anak hingga pengungsi yang terkena dampak bencana maupun konflik ((ICRC, 2011).

Selain ICRC ada pula NGO yang memberi bantuan yaitu Himalayan Foundation. Salah satu sasaran yang menerima bantuan dari Himalayan Foundation adalah penduduk dataran tinggi Tibet di China. Penduduk dataran tinggi Tibet tidak mendapatkan akses

kehidupan seperti penduduk China lainnya selain akses mereka sulit untuk dijangkau, kebanyakan penduduk Tibet tidak mendapatkan pengakuan dari negaranya. Dengan adanya Himalayan Foundation, penduduk Tibet dapat membangun jembatan, mengakses air bersih, sekolah hingga klinik yang menguntungkan mereka (Foundation H. , t.thn.)

B. Catalyst Role

Sebagai Catalyst Role NGO memiliki kemampuan untuk menginspirasi, memberikan fasilitas atau berkontribusi dalam perubahan pembangunan antara actor-aktor didalam organisasi maupun tingkat individu. Kegiatan tersebut termasuk mengkoordinir organisasi akar rumput dan pembentukan kelompok sebagai landasan social, pendekatan untuk pemberdayaan pembangunan, melakukan lobby dan advokasi, mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, serta mempromosikan dan mengkampanyekan NGO secara umum (Lewis).

Peran NGO sebagai katalisator dapat dikatakan sebagai peran penghubung.

Catalyst Role dari NGO adalah kegiatan advokasi. Kegiatan advokasi yang dapat memobilisasi massa hingga mempengaruhi kebijakan. Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh para NGO untuk memberdayakan mereka yang lemah dan membantu mendapatkan akses informasi sehingga mereka mampu menjangkau dunia luar bahkan tidak jarang masyarakat mulai tahu apa yang pemerintah pusat lakukan dan kebijakan apa saja yang dikeluarkan. Tujuan lain dari advokasi yang dilakukan NGO adalah untuk mendemokratisasikan sebuah sistem. Advokasi tidak hanya dilakukan oleh NGO dengan pemerintah dan masyarakat umum tetapi juga sesama NGO.

Dengan percepatan pertumbuhan NGO membuat mereka lebih gencar dalam memperluas nilai dan norma yang miliki. NGO China yang bergerak dibidang advokasi salah satunya adalah Human Right In China atau HRIC. Tujuan dari advokasi yang dilakukan HRIC adalah memberikan dukungan kepada masyarakat sipil di China dan

memberikan wawasan kepada masyarakat atas kewaspadaan dan perhatian terhadap isu-isu yang sedang terjadi disekitar mereka (China H. R., t.thn.). Advokasi yang dilakukan untuk membantu individu maupun kelompok yang memiliki kasus yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan memberikan solusi kepada mereka untuk jangka waktu yang panjang. Macam kegiatan advokasi mereka berupa penelitian, pelatihan hingga studi kasus terkait hak asasi manusia. Setelah advokasi yang dilakukan berhasil HRIC mulai mempromosikan hasil advokasi mereka kepada pemerintah.

C. Partnership Role

Sebagai Partner Role, NGO yang mulai tumbuh dan berkembang mulai menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, pendonor dana dan sektor-sektor yang ikut bekerja sama dengan NGO. Kerja sama NGO tidak hanya dilakukan oleh ketiga sektor tersebut namun juga dilakukan dengan sesama NGO dengan tujuan untuk membangun kapasitas NGO-NGO tersebut. Banyaknya kepentingan dalam hubungan kerja sama pembangunan yang berjalan

menjadikan pemerintah membangun jaringan dengan para NGO maupun organisasi lainnya.

Hubungan antara pemerintah dan NGO tidaklah mudah keduanya harus melalui proses negosiasi untuk mewujudkan hubungan timbal balik. Peran NGO partnership role membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan tidak jarang membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena kedua actor harus memiliki jaringan komunikasi yang baru hingga staff yang baru dan baik agar nantinya dapat menjalin komunikasi dengan agen-agen NGO lainnya. Berhasil atau tidaknya kerjasama antara pemerintah dengan NGO dapat dilihat dari pembangunan yang ada. Tidak berbeda jauh dengan peran pertama yaitu implementer role yang menekankan bahwa keduanya tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai tujuan awal (Lewis).

Sesuai dengan namanya yaitu Partnership Role, pemerintah bekerja sama dengan NGO untuk hal-hal yang tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah seperti pengentasan kemiskinan. NGO China yang bergerak dalam bidang pengetasan kemiskinan salah satunya

yaitu China Foundation for Poverty Alleviation (CFPA). NGO yang didirikan pada tahun 1989 memiliki tujuan untuk menjadi NGO yang terpercaya dengan misi mengurangi kemiskinan, menyebarluaskan kemiskinan dan selalu berbuat kebaikan. Program domestic NGO ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan hidup dalam populasi yang beragam. Beberapa program domestik CFPA yaitu kesehatan, pendidikan, bantuan bencana alam, dan penghidupan ekonomi bagi penduduk pedesaan (Allevation, t.thn.).

NGO ini tidak hanya memiliki program domestic saja tetapi juga menjalankan program internasionalnya dalam pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2005 CFPA sudah menerapkan program mereka di 12 negara diantaranya Sudan, Pakistan, Myanmar dan tidak terkecuali Indonesia. Program-program yang dilakukan oleh CFPA tidak lain hanyalah untuk mengurangi dan meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan dari kemiskinan yang terjadi baik di China maupun dinegara lainnya.

Dari ketiga peran penting NGO diatas dapat dikatakan bahwa NGO memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Kemunculan NGO secara umum dapat menciptakan negosiasi antar Negara yang berpengaruh pada kepentingan global bahkan tidak jarang peran NGO sangat dibutuhkan dalam penghapusan perbudakan. Dalam pembangunan peran NGO tidak hanya berpusat pada hubungan antar Negara tetapi meluas hingga bidang bisnis. Dengan kemajuan dan kecepatan teknologi saat ini membuat NGO semakin udah untuk memobilisasi masyarakat dan para aktivis untuk memusatkan perhatian mereka terhadap lingkungan sosialnya (Development, t.thn.)

Kesimpulan

Dengan reformasi dan kebijakan pintu terbuka tersebut menjadikan China sebagai salah satu negara yang memiliki ekonomi terkuat di Asia. Hal itu ditandai dengan banyaknya produk-produk China yang hampir menguasai pasar. Bahkan beberapa berita online menyandingkan China dengan Amerika dan dianggap sebagai

penantang negara super power tersebut. Adanya kebijakan pintu terbuka memberikan efek yang positif tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat China. Penduduk China menjadi lebih terbuka akan adanya globalisasi dan lebih mudah untuk menjalin komunikasi dengan dunia luar.

Penduduk China yang semakin terbuka akan adanya modernisasi di era globalisasi, mulai menyadari banyaknya tantangan dan tuntutan sehingga memaksa mereka untuk mengejar kepentingan-kepentingan mereka terutama dalam hal perekonomian. Ekonomi masyarakat China yang mapan menjadikan mereka memiliki daya beli dan daya tawar yang tinggi atau bargaining position. Ketika masyarakat memiliki bargaining position yang tinggi maka akan semakin tinggi pula kedudukan mereka dari segi intelektual. Suatu kelompok masyarakat yang memiliki intelektual tinggi akan cenderung membentuk kelompok atau organisasi yang dianggap dapat menampung aspirasi mereka.

Kelompok atau organisasi dimaksud adalah organisasi non pemerintah atau yang lebih dikenal dengan non governmental organization (NGO). NGO di China yang awalnya dilarang oleh pemerintah karena dapat menyebarkan nilai-nilai demokrasi yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan sistem yang berjalan di China. Tetapi seiring dengan terjadinya reformasi ekonomi dan kebijakan pintu terbuka maka semakin banyak kelompok maupun organisasi demokrasi yang beroperasi di China. Dengan banyaknya organisasi yang beroperasi di China membuat pemerintah kewalahan dalam mengontrol perkembangan mereka sehingga pemerintah pusat menetapkan beberapa peraturan untuk mengendalikan terjadinya peningkatan NGO.

Referensi

BUKU

Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional Edisi Kelima : Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lewis, D. (n.d.). *The Management of Non Governmental Organization*.

Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi* . Jakarta: LP3S.

(n.d.). Retrieved November 23, 2017, from Teori Pembelajaran Konstruktivisme: ebook.repo.mercubuana-yogya.ac.id

JURNAL

Angang, H., Linlin, H., & Zhixiao, C. (n.d.). China's Economic Growth and Poverty Reduction. 2-3.

Ball, C., & Dunn, L. (n.d.). Non Governmental Organization: Guidelines for Good Policy and Practice. *The Commonwealth Foundation*, 1

Bank, A. D. (1991). Non Governmental Initiative in The Urban Poor and Basic Infratucture Service in Asia and Pasific. *Asian Development Bank*

Bo, J. H. (2016). Beyond Borders: China's NGO Respond to World Material Disasters. *Asia Foundation*.

Brief, C. D. (n.d.). *Special Report: The Roles and Challenges of International NGOs in China's Development*. Beijing: China Development Brief (Reporting on China's Civil Society).

n.d.). *Brief History of China*, 6

Chow, G. C. (n.d.). The Impact Joining WTO On China's Economic, Legal, and Political Institutions. *Princeton University*, 2-3.

Darlington, R. (2017). *A Short Guide To The Chinese Political System*. United State Congressional Research Service

- Dellios, R. (2004-2005). The Rise of China as Global Power. *The Culture Mandala vol. 6 no.2*.
- Edele, M. (2005). *Non Governmental Organization in China*. Geneva: CASIN.
- Gough, K. (2004). Emerging Civil Society in China. *Sida*, 16.
- Hartati, D. (n.d.). Konfusianisme Dalam Kebudayaan China Modern. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 175-176
- Hsu, C., Yu Chen, F., Horsley, J. P., & Stern, R. (2016). *The State of NGOs in China Today*.
- Irish, L. E., Dongsheng, J., & Simon, K. W. (2004). *China's Tax Rules for Not Profit Organization*.
- Jie, C. (2006). The NGO Community in China. *China Perspectives*.
- Jordan, L., & Tuijl, P. V. (n.d.). Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy. 3.
- Lai, W. M. (2016). Non Governmentar Organization and Government in China : Enemies or Allies? In S. Wei, & Y. L. Jun, *Governing Society in Contemporary China* (p. 60). World Scientific
- Lu, Y. (2005). The Growth of Civil Society in China Key Challenges for NGOs. *Asia Programme*, 1.
- Phillip, G. (2011). Democracy and Democratisation. 11.

- Qin, H. (2017). Understanding China's Third Sector. *Stanford Social Innovation Review*.
- Report, T. A. (2005). *PRC: NGO-Governmental Partnership in Village Level Poverty Alleviation Finance*.
- Uwejevwe, S. (2005). The Role of NGO in Development. *Nigeria Village Severe*.
- YE, Z. (2003). China's Emerging Civil Society. 4-5.
- Yee, H. S. (2014). The Theory and Practice of "one country two system" in Macau. 3.
- Zhang, Z., & Ghuo, C. (n.d.). Advocacy by Chinese non profit organization: Towards a Responsive Government .

BERITA :

- Asia, G. 2. (2013, April 26). *Chinese NGOs Coordinate Sichuan Earhquake Resonse*. Retrieved from Give 2 Asia:
<http://www.give2asia.org/>
- Liu, D. (2013, Oktober 7). *NGOs emerge in China, but face more challenges* . Retrieved Januari 23, 2018, from THOMSON REUTERS FOUNDATION NEWS:
<http://news.trust.org//item/2013007121609-gloxo2>
- News, B. (2012, Oktober 8). *How China is Rule : Politburo*. Retrieved Februari 12, 2018, from BBC News:
<http://www.bbc.com/news/world-asia-pasific>

News, G. (2012, Maret 23). *China GDP : how it change since 1980*. Retrieved Januari 29, 2018, from Guardian News: <https://www.theguardian.com/news>

Non Gornvmental Organization Uncivil Society. (2015, August 22). Retrieved November 7, 2017, from The Economist: <http://www.economist.com/news/china>

Tiananmen 1989, Peristiwa Paling Berdarah di Tiongkok . (n.d.). Retrieved Maret 4, 2018, from Boombastis: <https://www.boombastis.com/demonstrasi-tiananmen>

WEBSITE :

(n.d.). Retrieved November 14, 2017, from Non Governmental Organization: <http://www.immagic.com/eLibrary/>

Agency, E. I. (n.d.). Retrieved Januari 15, 2018, from Environmental Investigation Agency: <https://eia-global.org/>

Agency, E. I. (2017, September 18). *China Program Lead, Forest Campaign*. Retrieved Januari 15, 2018, from Environmental Investigation Agency: <https://eia-global.org/jobs/china-program-lead>

Akkaya, S. (n.d.). *Political, Economic, and Security Perspectives of China in New Global Order*. Retrieved Februari 1, 2018, from Ifimes (International Institute for Middle East and Balkan Studies): www.ifimes.org/

Allevation, C. F. (n.d.). Retrieved from CFPA: <http://en/cfpa/org.cn>

- Bank, T. W. (2017, Maret 28). *The World Bank in China*. Retrieved Februari 15, 2018, from The World Bank: www.worldbank.org
- Brief, C. D. (n.d.). *China Development Brief*. Retrieved November 13, 2017, from Friends of the Earth Hong Kong: chinadevelopmentbrief.cn/directory/Friends-of-the-earth-hong-kong/
- Brief, C. D. (n.d.). *Fauna and Flora International*. Retrieved Januari 18, 2018, from China Development Brief: <http://chinadevelopmentbrief.cn/directory/fauna-and-flora-international>
- Brief, C. D. (n.d.). *Marie Stopes International of China* . Retrieved November 13, 2017, from chinadevelopmentbrief.cn/directory/marie-stops-international-china/
- China, H. R. (n.d.). *Advocacy Human Right in China*. Retrieved Maret 5, 2018, from Human Right in China: <https://www.hrichina.org/en/advocacy>
- China, R. C. (n.d.). Retrieved Januari 11, 2018, from Red Cross Society of China: <https://www.china.org.cn/english>
- Constitution of The Communist Party in China Revised* . (2017, Oktober 24). Retrieved Desember 25, 2017, from China.org.cn: www.china.org.cn
- Crisis, C. i. (n.d.). Retrieved Januari 13, 2018, from Children in Crisis: <https://www.childrenincrisis.org/>

- Cross, I. R. (n.d.). Retrieved November 12, 2017, from <https://www.redcross.org.hk/en/disasterrelief>
- Democracy, N. E. (n.d.). Retrieved Januari 13, 2018, from National Endowment of Democracy: <https://www.ned.org/>
- Development, I. I. (n.d.). *The Rise and Role of NGOs in Sustainable Development*. Retrieved from Internasional Institute for Sustainable Development: <http://www.iisd.org/bussines/ngo/roles>
- Foundation, A. H. (n.d.). Retrieved Januari 22, 2018, from America Himalaya Foundation: <https://www.himalayan-foundation.org/>
- Foundation, C. C. (n.d.). *China Care Foundation about us*. Retrieved November 12, 2017, from China Care Foundation: www.chinacare.org/about
- Foundation, C. H. (n.d.). Retrieved Januari 15, 2018, from Chi Heng Foundation: www.chihengfoundation.com
- Foundation, C. Y. (n.d.). Retrieved November 13, 2017, from China Youth Development Foundation: en-cydf.org.cn/ourhistory/
- Foundation, F. H. (n.d.). Retrieved Januari 16, 2018, from Family Health International: <https://www.fhifoundation.org/>
- Foundation, H. (n.d.). Retrieved November 13, 2017, from Himalaya Foundation: <https://www.himalaya-foundation.org>
- Foundation, H. K. (n.d.). Retrieved Januari 18, 2018, from Hong Kong AIDS Foundation: <http://aids.org.hk/>

- Fund, E. D. (n.d.). Retrieved Januari 15, 2018, from Environmental Defense Fund: <https://www.edf.org/office/beijing-china>
- Gadsden, A. E. (2010, Juli 23). *Chinese Nongovernmental Organizations*. Retrieved Februari 6, 2018, from American Enterprise Institute: <http://www.aei.org/publication/chinese-nongovernmental-organizations/>
- Hand, C. G. (n.d.). *China Foundation for Poverty Allevation*. Retrieved November 12, 2017, from Crossroad Global Hands: <https://www.globalhand.org/en/organisation/10170>
- He, H. F., & Chaohui, L. (2017, Oktober 14). *China's version globalization*. Retrieved 14 Februari, 2018, from Bussiness Standard: www.bussiness-standard.com
- Hirst, T. (2015, Juli 30). *A Brief History of China's Economic Growth*. Retrieved Januari 29, 2018, from Brief History: <https://www.weforum.org/agenda/2015/07>
- Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movement of China* . (n.d.). Retrieved Maret 5, 2018, from Hong Kong Alliance: <https://hka8964.wordpress.com/>
- ICRC. (2011, Juni 1). Retrieved from ICRC: <https://www.icrc.org/>
- International, F. H. (n.d.). Retrieved Januari 16, 2018, from Family Health International China: <https://www.fhi360.org/countries/china>
- International, M. S. (n.d.). *Marie Stopes International China*. Retrieved Januari 18, 2018, from Marie Stop International: <https://mariestops.org>

- Jones, R. (2012, Agustus 30). *Womens Rights and Organizing in China*. Retrieved from Awids Womens Right: <https://www.awid.org>
- Kuo, M. A. (2017, Februari 22). *The Future of NGOs in US-China Relations*. Retrieved Februari 2, 2018, from The Diplomat: <https://thediplomat.com/>
- Liu, D. (2013, Oktober 7). *NGOs emerge in China, but face more challenges* . Retrieved Januari 23, 2018, from THOMSON REUTERS FOUNDATION NEWS: <http://news.trust.org//item/2013007121609-gloxo2/>
- Nature, I. U. (n.d.). Retrieved Januari 10, 2018, from International Union for Conservation of Nature: <https://www.iucn.org/about>
- Oxfam. (n.d.). *The Power of People Againts Poverty*. Retrieved November 12, 2017, from Oxfam China: <https://www.oxfam.org/en/countries/china>
- Pengertian, K. D. (n.d.). *Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli*. Retrieved Desember 20, 2017, from definisipengertian.net: definisipengertian.net/pengertian-ideologi-enurut-para-ahli/
- Peradaban Kuno*. (n.d.). Retrieved Januari 4, 2018, from Peradaban Kuno China: <https://perdabankuno.wordpress.com/china/dinasti-shang/>
- Relation.org, I. (n.d.). *Contructivism (international relation)*. Retrieved November 23, 2017, from International Relation.org Know The World: internationalrelation.org/constructivism_in_international_relation

Service, H. C. (n.d.). Retrieved Januari 18, 2018, from Holt China Children's Service:
<http://www.holtinternational.org/about/china.shtml>

Tigers, S. C. (n.d.). *Reintroduction*. Retrieved November 13, 2017, from Save China's Tigers:
www.savechinastigers.org/reintroduction.html

Woetzel, J., Seong, J., Madgavkar, A., Lund, S., & Lin, D. Y. (n.d.). *China's role in the next phase of globalization*. Retrieved Februari 14, 2018, from Mckinsey Global Intitute:
<https://www.mckinsey.com/>

Zukus, J. (2017, Mei 9). *Globalization with Chinese characteristic : a new international standars?* Retrieved Februari 15, 2018, from The Diplomat: <https://thediplomat.com/>

